



LAPORAN **KINERJA**

Sekretariat Daerah Kab. Gresik



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Gresik, 27 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF



Pada Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2021-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik 2025-2029 dapat dilihat bahwa :

- Pada Renstra 2021-2026 hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 92,09% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 74,57% dengan kategori "SEDANG" dan efisiensi sebesar 19,03%.
- Pada Renstra 2025-2026 hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 102,76% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 74,57% dengan kategori "SEDANG" dan efisiensi sebesar 25,89%.



Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 10 (sepuluh) Indikator pada Renstra 2021-2026 dan 10 (sepuluh) Indikator pada Renstra 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada Renstra 2021-2026, terdapat 2 Indikator dengan capaian melebihi 100%, 2 Indikator dengan capaian tepat 100% dan 6 indikator dengan capaian kurang dari 100%
- Pada Renstra 2025-2026 terdapat 5 Indikator dengan capaian melebihi 100% dan 5 indikator dengan capaian kurang dari 100%

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 113.121.078.443 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.84.356.165.469,11 atau 74.57%.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi v

BAB I Latar Belakang 1

BAB II Perencanaan Kinerja 13

BAB III Akuntabilitas Kinerja 26

BAB IV Penutup 150





BAB I

LATAR

BELAKANG

LATAR BELAKANG



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 diharapkan dapat :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik,
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerjanya.



GAMBARAN UMUM



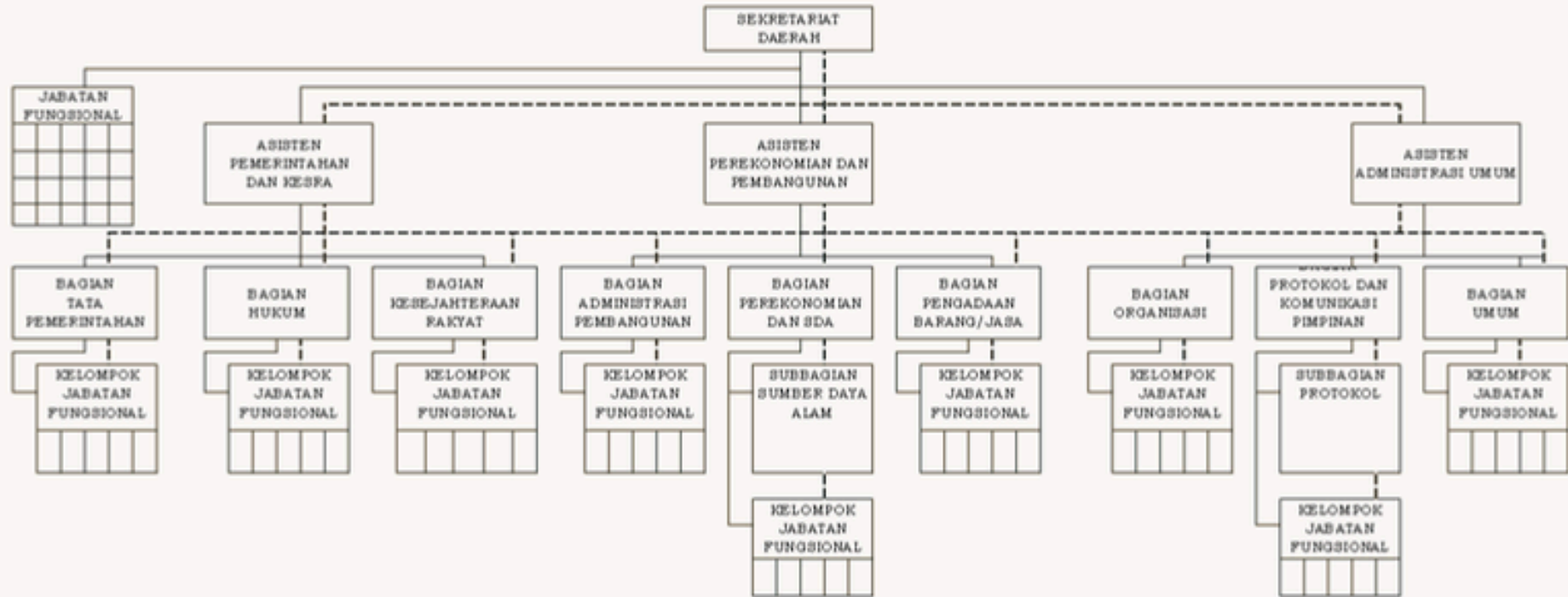
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



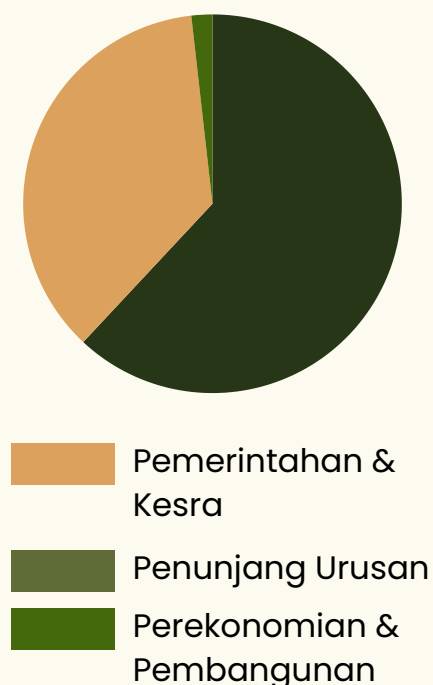
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK



B. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2025 berjumlah Rp.113.121.078.443. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.109.404.068.905 mengalami peningkatan sebanyak Rp.3.717.009.538 atau 3,39% rincian anggaran yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp.70.088.970.998,90
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp.41.010.542.795
- Program Perekonomian dan Pembangunan Rp.2.021.564.649,10



C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor :
700/2309.1/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Agar dokumen perencanaan pada data dukung LKE diformalkan	Dokumen Perencanaan telah diformalkan (Renstra 2025-2029)
2	Agar Indikator Kinerja Tujuan dalam Renstra, yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Indeks Kemiskinan Multidimensi menggunakan satuan output yang sesuai	Satuan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Indeks Kemiskinan Multidimensi telah disesuaikan yaitu menggunakan Indeks
3	Agar menyelaraskan satuan indikator antara renstra dan SK IKU/IKI	Seluruh satuan Indikator pada Renstra dan SK IKU/IKI telah diselaraskan



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
4	Agar menyelaraskan Sasaran 3 pada Renstra dan IKU	Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik telah diselaraskan pada Renstra dan IKU
5	Agar indikator kinerja tujuan yakni indeks kerukunan umat beragama tidak menggunakan target dalam bentuk rentang	Indeks Harmoni telah ditargetkan sesuai dengan RPJMD tidak dalam bentuk rentang
6	Agar menyelaraskan indikator tujuan antara renstra dan cascading	Cascading telah diselaraskan dengan dokumen Renstra
7	Agar dalam kriteria "Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja", dapat melampirkan bukti rapat yang menunjukkan kehadiran dari sekretaris daerah	Pada Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Sekretaris Daerah telah terlibat aktif dalam proses penyusunannya

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
8	Agar melampirkan bukti screenshot rekap tunjangan pada aplikasi SIPANTAS dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan sebagai dasar pengukuran kinerja	Data dukung terkait Rekap Tunjangan akan dilampirkan pada Kertas Kerja Evaluasi Tahun 2025
9	Agar LKjIP menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir, tidak hanya dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya	Pada Bab 3 telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja pada Renstra 2021-2026 mulai dari Tahun 2021-2025, sedangkan pada Renstra 2025-2029 perbandingan dilakukan mulai Tahun 2024-2025
10	Agar melampirkan laporan budaya kinerja	Penyusunan Laporan Budaya Kerja 2025 akan dilakukan pada Tahun 2026 maksimal Semester II



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
11	Agar melengkapi bukti dukung pada rekomendasi LHE SAKIP TA 2023	Data dukung terkait Tindaklanjut LHE SAKIP TA 2023 akan dilampirkan pada Kertas Kerja Evaluasi Tahun 2025



D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah yaitu:



Potensi Daerah	Permasalahan Sekretariat Daerah	KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Sekretariat Daerah Gresik			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Jawa Timur	
Digitalisasi layanan publik, sistem merit ASN, dan transparansi birokrasi	Perlambatan reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan	Everything is a Service (EIS), Remote Work Everywhere	Perlindungan terhadap kedaulatan negara	Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan baik	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja sekretariat daerah Kabupaten Gresik selama tahun 2025.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran



A decorative graphic consisting of several concentric circles, with the outermost circle being the most prominent. The circles are light gray and are positioned behind the main title area.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan administratif dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perangkat Daerah
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pada Tahun 2025, terdapat 2 (dua) periode Rencana Strategis yang berjalan yaitu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025,, Kinerja Utama pada setiap periode akan dianalisis.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2025 yaitu :

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi
- Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target Tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1 Matriks Renstra Sekretariat Daerah
Tahun 2021-2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Sasaran 1: Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	83.5
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik
Sasaran 2: Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.3
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	98,7
	Nilai Peduli HAM	96



TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Sasaran 3 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	4
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	88,59
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	92

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2025 yaitu :

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit



Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama serta Target Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Renstra Sekretariat Daerah
Tahun 2025–2029

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP	87
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan	96,8
Sasaran 3 : Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	96
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,4



TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	84.5
Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88.23
Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan	Indeks tata kelola pengadaan	77
Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	Angka Inflasi	3.5
Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum	Nilai Peduli HAM	90.96
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,62

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 067/8/437.12/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 067/5/437.12/2022 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu



Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, berikut merupakan Indikator Kinerja Utama untuk Renstra 2021-2026 :

KODE	INDIKATOR KINERJA
S.1	Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif
I.K.S.1.1	Predikat AKIP
	Predikat AKIP adalah kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Dasar pengukuran yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	Sumber data : Predikat AKIP berdasarkan hasil penilaian Kementerian PANRB
I.K.S.1.2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum adalah jumlah nilai rata-rata unsur pelayanan dari Bagian Umum.
	Sumber data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
I.K.S.1.3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum adalah jumlah nilai rata-rata unsur pelayanan dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
	Sumber data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

KODE	INDIKATOR KINERJA
	Sumber data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
S.2	Sasaran 2 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis
I.K.S.2.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah nilai atas laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
	Sumber data : Nilai LPPD yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
I.K.S.2.2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi adalah jumlah kebijakan yang disahkan Kepala Perangkat Daerah dibagi jumlah kebijakan yang dibutuhkan dikali 100%
	Sumber data : Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tahun berkenaan Roadmap/Rencana Aksi/ Dokumen Perencanaan Sektor



KODE	INDIKATOR KINERJA
I.K.S.2.3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan adalah jumlah produk hukum yang diproses dibagi jumlah usulan produk hukum dikali 100%
	Sumber data : Rekapitulasi Produk Hukum
I.K.S.2.4	Nilai Peduli HAM
	Nilai Peduli HAM adalah validasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui formulir isian dengan substansi hak diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM
	Sumber data : Hasil validasi penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM
S.3	Sasaran 3 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel
I.K.S.3.1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)
	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP) adalah Hasil pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ
	Sumber data : Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil penilaian LKPP

KODE	INDIKATOR KINERJA
	Sumber data : Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan hasil penilaian LKPP
I.K.S.3.2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD adalah jumlah capaian kinerja BUMD dibagi jumlah BUMD dikali 100%
	Sumber data : Laporan Tahunan BUMD
I.K.S.3.3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah adalah jumlah Perangkat Daerah yang capaian kinerja APBD memenuhi minimal 80% dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali 100%
	Sumber data : Laporan Penyerapan Anggaran

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 065/2/437.12/2026 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah :



KODE	INDIKATOR KINERJA
S.1	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
I.K.S.1.1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP
	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP (≥ 80) adalah jumlah perangkat daerah yang berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal memperoleh nilai ≥ 80 atau kategori A dibagi dengan jumlah perangkat daerah.
	Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik
S.2	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi
I.K.S.2.1	Hasil Evaluasi Kelembagaan
	Hasil evaluasi kelembagaan adalah hasil penilaian mandiri terkait kematangan perangkat daerah yang dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menggambarkan sejauh mana struktur dan proses organisasi instansi pemerintah telah memenuhi prinsip tepat fungsi, tepat struktur, dan tepat proses. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah.
	Sumber data : Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gresik



KODE	INDIKATOR KINERJA
S.3	Sasaran 3 : Meningkatnya mutu pelayanan publik
I.K.S.3.1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah nilai yang dikeluarkan oleh Ombudsman sebagai upaya percepatan dan pemerataan mutu pelayanan publik. mengacu pada Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
	Sumber data : Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).
S.4	Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
I.K.S41.1	Nilai LPPD
	Nilai LPPD merupakan skor/evaluasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) atas laporan tersebut.
	Sumber data : surat Keputusan menteri dalam negeri tentang hasil Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota



KODE	INDIKATOR KINERJA
S.5	Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah
I.K.S.5.1	Indeks Kualitas Kebijakan
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Instrumen ini menekankan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) serta keseluruhan proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan keterlibatan publik.
	Sumber data : Laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
S.6	Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah
I.K.S.6.1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima.
	Sumber data : Hasil publikasi IKM dari https://sukma.jatimprov.go.id/



KODE	INDIKATOR KINERJA
S.7	Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan
I.K.S.7.1	Indeks tata kelola pengadaan
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang disusun oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penilaian ini mencakup aspek operasional seperti sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan sistem elektronik pengadaan.
	Sumber data : Dashboard penilaian ITKP yang dipublikasikan oleh LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp
S.8	Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah
I.K.S.8.1	Angka Inflasi
	angka inflasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan persentase kenaikan (atau penurunan) harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya bulanan atau tahunan
	Sumber data : Angka inflasi yang dipublikasikan oleh BPS



KODE	INDIKATOR KINERJA
S.9	Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum
I.K.S.9.1	Nilai Peduli HAM
	Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
	Sumber data : Hasil Validasi Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM.
S.10	Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik
I.K.S.10.1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
	Sumber data : Hasil Evaluasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021–2026 dan Renstra 2025–2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah disusun dalam 2 (dua) periode waktu, yaitu Perjanjian Kinerja APBD (Januari 2025) dan Perjanjian Kinerja PAPBD (Oktober 2025). Kinerja pada Perjanjian Kinerja APBD berdasarkan pada Renstra 2021–2026. Sedangkan Kinerja pada Perjanjian Kinerja PAPBD berdasarkan Renstra 2025–2029.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
(Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
Sasaran 1: Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	1	Predikat AKIP	83.5
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
Sasaran 2 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.3
	2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100
	3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	98,7
	4	Nilai Peduli HAM	96
Sasaran 3 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	4
	2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	88,59
	3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	92



Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025
(Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP	87
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan	96,8
Sasaran 3 : Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	96
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,4
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	84.5
Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88.23
Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan	Indeks tata kelola pengadaan	77



TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	Angka Inflasi	3.5
Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum	Nilai Peduli HAM	90.96
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,62

D. RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2025

Anggaran Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 sebagai berikut:

PROGRAM-KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU PAPBD	SELISIH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	68,880,663,084.59	70,088,970,998.90	1,208,307,914.31
Penataan Organisasi	862,439,262.00	689,981,832.99	-172,457,429.01
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,208,191,298.00	1,608,766,910	-599,424,388

PROGRAM-KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU PAPBD	SELISIH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,824,233,279.59	22,571,913,800.00	-2,252,319,479.59
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	54,110,240.00	53,860,000.00	-250,240.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324,473,354.00	474,098,354.00	149,625,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,244,616,832.00	8,023,232,349.91	-221,384,482.09
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,319,306,459.00	5,758,013,159	438,706,700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,719,389,877.00	17,789,539,877	2,070,150,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,570,827,529.00	6,265,248,529	1,694,421,000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,905,708,000.00	5,992,501,733	86,793,733

PROGRAM-KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU PAPBD	SELISIH
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	847,366,954.00	861,814,454	14,447,500
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40,307,297,714.99	41,010,542,795.00	703,245,080.01
Administrasi Tata Pemerintahan	1,934,894,573.00	1,370,345,873.00	-564,548,700.00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	101,295,607.00	78,945,607.00	-22,350,000.00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,780,000,000.00	1,530,575,960	-249,424,040
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	36,491,107,534.99	38,030,675,355.00	1,539,567,820.01
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,649,193,530.60	2,021,564,649.10	-627,628,881.50
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,058,222,133.00	811,864,863.50	-246,357,269.50
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	404,862,398.00	256,839,666	-148,022,732



PROGRAM-KEGIATAN	PAGU APBD	PAGU PAPBD	SELISIH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	501,051,780.00	465,284,200	-35,767,580
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	685,057,219.60	487,575,919.60	-197,481,300.00
	111,837,154,330.18	113,121,078,443.00	1,283,924,112.82



A decorative graphic consisting of several concentric, semi-circular arcs in a light gray color, positioned behind the main title area.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA



A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) APBD dan PAPBD Tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah



Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dilakukan dengan beberapa cara perbandingan, yaitu :

1.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Predikat AKIP	83.5	77,15	92,40%	Sangat Tinggi
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Tinggi
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Tinggi



Sasaran 2 :
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan
kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang
hukum yang harmonis

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.3	3.4093	103.31%	Sangat Tinggi
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100	54.29	54.29%	Rendah
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	98.7	90.76	91.95%	Sangat Tinggi
4	Nilai Peduli HAM	96	90.95	94.74%	Sangat Tinggi



Sasaran 3 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	4	3	75.00%	Sedang
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	88.59	191.58	110.00%	Sangat Tinggi
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	92	91.30	99.24%	Sangat Tinggi
Rata-rata				92,09	Sangat Tinggi

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 8 (delapan) IKU dengan kategori Sangat Tinggi, 1 (satu) IKU dengan kategori Sedang, dan 1 (satu) IKU dengan kategori Rendah. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 92,09% dengan kategori Sangat Tinggi.



Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80	0.87	0.96	110.00%	Sangat Tinggi

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Nilai LPPD	3.3	3.4093	103.31%	Sangat Tinggi

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	96.8	96.7	99.90%	Sangat Tinggi



Sasaran 4 : Meningkatnya mutu pelayanan publik					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	96	91,59	95,41%	Sangat Tinggi
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Kualitas Kebijakan	84.5	82.85	98.05%	Sangat Tinggi
Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88.23	89.85	101.84%	Sangat Tinggi



Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks tata kelola pengadaan	77	85.66	110.00%	Sangat Tinggi
Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Angka Inflasi	3.5	2.44	110.00%	Sangat Tinggi
Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Nilai Peduli HAM	90.96	90.95	99.99%	Sangat Tinggi



Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik					
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4.62	4.58	99.13%	Sangat Tinggi
Rata-rata				102,76	Sangat Tinggi

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 10 (sepuluh) IKU dengan kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 102,76% dengan kategori Sangat Tinggi.



2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026

Sasaran 1 :

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Predikat AKIP	80,86	81,59	81,93	80,6	77,15	Menurun
2	Indeks Kepuasan Pelaya-nan Umum	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat
3	Indeks Kepuasan Pelaya-nan Keproto-kolan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat

Sasaran 2 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis							
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3	3,3121	3,07	3,07	3.4093	Meningkat
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	95,45%	100%	138,59	67,62%	54.29	Menurun
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	83,70%	100%	91,92%	98,70%	90.76	Menurun
4	Nilai Peduli HAM	N/A	98,45	90.95	90.95	90.95	Menurun

Sasaran 3 :

Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Meningkat
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	N/A	N/A	83%	88,59%	191.58	Meningkat
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	N/A	N/A	93,48%	91,30%	91.30	Meningkat

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 6 (enam) Indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat selama periode 2021-2025 dan 4 (empat) indikator dengan realisasi yang rata-rata menurun selama periode 2021-2025. Secara keseluruhan, performa Indikator Kinerja Utama selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan 60% indikator mengalami kenaikan dan 40% mengalami penurunan.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029				
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP	0,87	0.96	Meningkat
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Nilai LPPD	3,07	3.4093	Meningkat



Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	96.7	96.7	Nilai 2025 sama dengan 2024
Sasaran 4: Meningkatnya mutu pelayanan publik				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	95.88	91,59	Menurun
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks Kualitas Kebijakan	84,5	82,85	Menurun

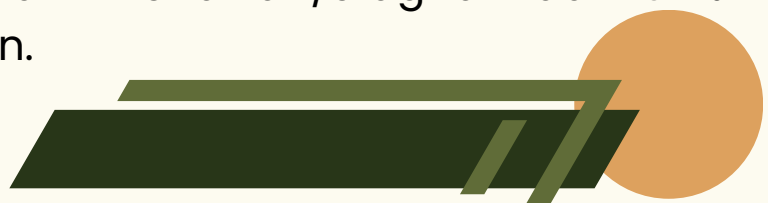


Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88,22	89.85	Meningkat
Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks tata kelola pengadaan	76,98	85.66	Meningkat
Sasaran 8: Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Angka Inflasi	1,85	2.44	Menurun



Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Nilai Peduli HAM	90.95	90.95	Nilai sama dengan 2024
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik				
No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4.58	4.58	Nilai 2025 sama dengan 2024. Nilai belum diumumkan.

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 4 (empat) Indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 3 (tiga) indikator yang sama dengan Tahun 2024, dan 3 (tiga) indikator dengan realisasi yang rata-rata menurun selama periode 2024-2025. Secara keseluruhan, performa Indikator Kinerja Utama selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan 70% indikator mengalami kenaikan/stagnan dan 30% mengalami penurunan.



3.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026

Sasaran 1 :

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Predikat AKIP	84	77,15	–
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Sangat Baik	+
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Sangat Baik	+

Sasaran 2 :

Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	>3,35	3.4093	–

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100	54.29	-
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90	90.76	+
4	Nilai Peduli HAM	>75	90.95	+
Sasaran 3 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel				
No	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	4	3	-
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75	191.58	+
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75	91.30	+



Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 6 (enam) IKU telah melebihi target akhir Renstra dan 4 (empat) IKI lainnya masih di bawah target akhir Renstra. Secara keseluruhan, performa Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan target akhir Renstra menunjukkan tren positif yang moderat. Dengan 60% indikator melebihi target 2026 dan 40% indikator di bawah target 2026.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029				
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80	0,96	0.96	+
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Nilai LPPD	3,425	3.4093	-



Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi				
No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	97,6	96.7	-
Sasaran 4 : Meningkatnya mutu pelayanan publik				
No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	97	91,59	-
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Kualitas Kebijakan	84,7	82.85	-



**Sasaran 6 :
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88,34	89.85	+

**Sasaran 7 :
Meningkatnya tata kelola pengadaan**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Indeks tata kelola pengadaan	81	85.66	+

**Sasaran 8 :
Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Angka Inflasi	3,5	2.44	+

**Sasaran 9 :
Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Nilai Peduli HAM	91	90.95	-



Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik				
No	Indikator Kinerja Utama	Target 2029	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,70	4.58	-

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 4 (empat) IKU telah melebihi target akhir Renstra dan 6 (enam) IKU lainnya masih di bawah target akhir Renstra. Secara keseluruhan, performa Indikator Kinerja Utama dibandingkan dengan target akhir Renstra menunjukkan trend positif, karena 40% IKU telah melampaui target akhir Renstra di tahun pertama periode Renstra 2025–2029.



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA **DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN** **NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN**

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026

Sasaran 1 :

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif

No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Predikat AKIP	A	77,15 (BB)	Lebih rendah
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	89,04 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sama
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	89,04 (Sangat Baik)	Sangat Baik	Sama

Sasaran 2 :

Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis

No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,6970	3.4093	Lebih Rendah

No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	N/A	54.29	Tidak bisa dibandingkan
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	97 (Kota Kediri)	90.76	Lebih Rendah
4	Nilai Peduli HAM	98,10 (Kota Madiun)	90.95	Lebih Rendah

Sasaran 3 :
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	3	3	Sama
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	N/A	191.58	Tidak bisa dibandingkan
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	N/A	91.30	Tidak bisa dibandingkan

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 3 (tiga) IKU dengan realisasi kinerja yang sama dengan realisasi Provinsi Jawa Timur, 4 (empat) IKU dengan realisasi kinerja yang kurang dari realisasi Provinsi Jawa Timur/Kota Madiun/Kota Kediri, dan 3 (tiga) IKU yang tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi/Kabupaten Kota lain karena tidak terdapat data resmi.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029				
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP	1	0.96	Lebih rendah
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Nilai LPPD	3,6970	3.4093	Lebih rendah



Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	95,29 (Kab. Tulungagung)	96.7	Lebih tinggi
Sasaran 4 : Meningkatnya mutu pelayanan publik				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	92,08	91,59	Lebih rendah
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Unggul (91-100)	82.85	Lebih rendah



Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	89,04	89.85	Lebih tinggi
Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Indeks tata kelola pengadaan	91,92	85.66	Lebih rendah
Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Angka Inflasi	2,93	2.44	Lebih tinggi



Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Nilai Peduli HAM	98,10 (Kota Madiun)	90.95	Lebih Rendah
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik				
No	Indikator Kinerja Utama	Prov. Jatim / Kab. Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/ Lebih Tinggi
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,27	4.58	Lebih tinggi

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 4 (empat) IKU dengan realisasi kinerja yang lebih tinggi daripada realisasi Provinsi Jawa Timur/Kab. Tulungagung, dan 6 (enam) IKU dengan realisasi kinerja yang kurang dari realisasi Provinsi Jawa Timur/Kota Madiun/Kota Kediri.



5.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026

Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Predikat AKIP	Faktor penghambat : Terjadi penurunan nilai pada semua komponen penilaian AKIP. Komponen Perencanaan Kinerja turun 1,96 poin, Komponen Pengukuran Kinerja turun 1,29 poin, Komponen Pelaporan Kinerja turun 0,09 poin dan Komponen Evaluasi Internal turun 0,11 poin.	Menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Faktor penunjang : 1. Penetapan kebijakan berupa Peraturan Bupati tentang Prosedur Fasilitasi dan Penyediaan Sarana Prasarana bagi Stakeholder Eksternal di Lingkungan Kabupaten Gresik (Perbup No. 82 Th 2025) 2. Penetapan SOP Layanan Umum	nihil

Sasaran 1 : Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Faktor penunjang : 1. Pemanfaatan sistem informasi untuk mempermudah koordinasi dan kelancaran kegiatan pimpinan 2. Penjadwalan personil yang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kompetensi	nihil
Sasaran 2 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Faktor Penunjang : 1. Melakukan pembinaan intensif kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan Indikator Kinerja Kunci 2. Pemanfaatan aplikasi e-LPPD untuk menghimpun data dan informasi IKK	nihil



No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Faktor penghambat : Menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait mekanisme Belanja Hibah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah	Melakukan perencanaan belanja hibah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	Faktor penghambat : Terdapat Produk Hukum yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga tidak bisa ditetapkan	1. Memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah pengusul Produk Hukum terkait kelengkapan administrasi 2. Penyelenggaraan bimbingan teknis Policy Brief
4	Nilai Peduli HAM	Faktor penghambat : Terdapat data dukung pada parameter penilaian yang kurang terpenuhi	Melakukan pendalaman terhadap parameter penilaian yang kurang dan mencukupi data dukung yang sesuai



Sasaran 3 :
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Faktor penghambat : 1. Kurangnya kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa 2. Belum dilakukan sosialisasi tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Aparat Penegak Hukum 3. Kurangnya jumlah Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	1. Peningkatan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa 2. Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa bersama Aparat Penegak Hukum 3. Penambahan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	Faktor pendukung : 1. Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja BUMD secara intensif 2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Bisnis BUMD 3. Penguatan BUMD melalui penetapan kebijakan penyertaan modal BUMD (Perda No. 10 Th 2025)	nihil



Sasaran 3 :
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	Faktor Penghambat : 1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembatasan belanja daerah 2. Kurangnya komitmen penyedia dalam penyelesaian kontrak 3. Menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait Belanja Hibah sehingga sebagian dana hibah tidak direalisasikan	1. Pengawasan secara intens terhadap pelaksanaan pekerjaan 2. Melakukan perencanaan belanja hibah dengan lebih selektif



Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80	Faktor penunjang : 1. Melakukan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah secara intensif 2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIAKRI dalam penyusunan dokumen SAKIP	Nihil

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Nilai LPPD	Faktor Penunjang : 1. Melakukan pembinaan intensif kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan Indikator Kinerja Kunci 2. Pemanfaatan aplikasi e-LPPD untuk menghimpun data dan informasi IKK	Nihil



Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	Terdapat perubahan formulasi perhitungan di Tahun 2025, sehingga nilai masih menggunakan nilai Tahun sebelumnya	Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi telah melakukan simulasi perhitungan Evaluasi Kelembagaan.
Sasaran 4 : Meningkatnya mutu pelayanan publik			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Faktor Pendukung : Sekretariat Daerah melakukan asistensi secara intensif kepada Unit Pelayanan Publik	Nihil



Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Faktor Penghambat : Terdapat regulasi baru yang implementasinya belum dilaksanakan secara keseluruhan	Sosialisasi dan sinkronisasi regulasi baru ke semua stakeholder secara berkelanjutan
Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Pendukung : Sekretariat Daerah melakukan asistensi secara intensif kepada Unit Pelayanan Publik	Nihil



Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Indeks tata kelola pengadaan	Faktor pendukung : 1. Adanya penambahan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa 2. Sosialisasi dan Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait SIRUP, eKatalog, Tender dan Non Tender 3. Kewajiban penggunaan ekatalog yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati	Nihil
Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Angka Inflasi	Faktor pendukung : 1. Penyelenggaraan rapat rutin mingguan, High Level Meeting 2. Fokus pada pelaksanaan 5 indikator penanganan inflasi 3. Sinkronisasi program pengendalian inflasi dengan BPS (Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi)	Nihil



Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Nilai Peduli HAM	Faktor penghambat: Terdapat data dukung pada parameter penilaian yang kurang terpenuhi	Melakukan pendalaman terhadap parameter penilaian yang kurang dan mencukupi data dukung yang sesuai
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik			
No	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Faktor penghambat : Belum optimalnya implementasi Surat Edaran tentang Gerakan Gemar Menabung	1.Sosialisasi Gerakan Gemar Menabung secara intensif 2.Menerbitkan Surat Edaran tentang penggunaan QRIS, transaksi non tunai



6. ALOKASI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026

Sasaran 1 :

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Predikat AKIP	0.61%	689,981,832.99	582,560,559.00	84.43%
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	59.93%	67,790,222,255.91	60,257,181,596.11	88.89%
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	1.42%	1,608,766,910.00	1,454,686,891.00	90.42%

Sasaran 2 :

Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1.28%	1,449,291,480.00	1,156,627,399.00	79.81%

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	33.62%	38,030,675,355.00	18,304,133,973.00	48.13%
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	0.83%	933,775,960.00	761,222,153.00	81.52%
4	Nilai Peduli HAM	0.53%	596,800,000.00	420,484,612.00	70.46%
Sasaran 3 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel					
No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	0.43%	487,575,919.60	425,227,078.00	87.21%
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	0.64%	722,123,866.00	437,310,299.00	60.56%
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	0.72%	811,864,863.50	556,730,909.00	68.57%
			113,121,078,443.00	84,356,165,469.11	74.57%

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi, 5 (lima) IKU dengan realisasi anggaran kategori Tinggi, 2 (dua) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sedang, 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Rendah, dan 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Rendah. Secara rata-rata capaian anggaran pada Tahun 2025 adalah sebesar 74,57% dengan kategori Tinggi.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029					
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80	0.87%	984,360,321.75	702,371,048.75	71.35%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Nilai LPPD	1.21%	1,370,345,873.00	1,102,635,221.00	80.46%

Sasaran 3 :
Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	0.15%	172,495,458.25	145,640,139.75	84.43%

Sasaran 4 :
Meningkatnya mutu pelayanan publik

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	0.15%	172,495,458.25	145,640,139.75	84.43%

Sasaran 5 :
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Indeks Kualitas Kebijakan	34.78%	39,346,860,757.00	19,186,203,732.50	48.76%

Sasaran 6 :
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	61.57%	69,650,430,231.16	61,911,500,804.86	88.89%

Sasaran 7 :
Meningkatnya tata kelola pengadaan

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Indeks tata kelola pengadaan	0.43%	487,575,919.60	425,227,078.00	87.21%

Sasaran 8 :
Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Angka Inflasi	0.08%	85,613,222.00	73,046,961.00	85.32%

Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum					
No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Nilai Peduli HAM	0.68%	765,287,980.00	590,853,382.50	77.21%
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik					
No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	0.08%	85,613,222.00	73,046,961.00	85.32%
			113,121,078,443.00	84,356,165,469.11	74.57%

Dari 10 (sepuluh) indikator Kinerja Utama, terdapat 8 (delapan) IKU dengan realisasi anggaran kategori Tinggi, 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sedang, dan 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Rendah. Secara rata-rata capaian anggaran pada Tahun 2025 adalah sebesar 74,57% dengan kategori Tinggi.

7. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017, Efisiensi dihitung berdasarkan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dikatakan efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja apabila hasil perhitungan efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%.



Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026

Sasaran 1 :

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Predikat AKIP	92,40%	84.43%	8,62
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	100%	88.89%	11.11
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	100%	90.42%	9.58

Sasaran 2 :

Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	103.31%	79.81%	22.75



No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	54.29%	48.13%	11.34
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	91.95%	81.52%	11.35
4	Nilai Peduli HAM	94.74%	70.46%	25.63

Sasaran 3 :
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	75.00%	87.21%	-16.28
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	110.00%	60.56%	44.95
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	99.24%	68.57%	30.90
		92,09%	74.57%	19,03



Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 92,09% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 74.57% dengan kategori “TINGGI” dan efisiensi sebesar 19,03. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja Renstra 2021-2026.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029				
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80	110.00%	71.92%	34.62
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Nilai LPPD	103.31%	79.81%	22.75



Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	99.90%	84.16%	15.75
Sasaran 4 : Meningkatnya mutu pelayanan publik				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	99.88%	80.28%	19.62
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
	Indeks Kualitas Kebijakan	98.05%	48.93%	50.10



Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	101.84%	88.92%	12.68
Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
	Indeks tata kelola pengadaan	110.00%	87.21%	20.72
Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
	Angka Inflasi	110.00%	46.89%	57.37



Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
	Nilai Peduli HAM	99.99%	70.46%	29.54
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik				
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	99.13%	85.32%	13.93
		103.21%	74.57%	25,89

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 103.21% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 74.57% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 25.89. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah belum efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai kinerja Renstra Tahun 2025-2029.



ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026

Sasaran 1 :

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Predikat AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Penataan Organisasi
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sasaran 2 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Fasilitasi Kerja Sama Daerah
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	Nilai Peduli HAM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sasaran 3 : Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
2	Rata – Rata Capaian Kinerja BUMD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Pembahasan lebih lanjut tentang Program dan Kegiatan yang menunjang setiap indikator Renstra 2021–2026 disampaikan pada Sub Bab selanjutnya yaitu Analisis Kinerja Utama



Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP	1. Penataan Organisasi 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Nilai LPPD	1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	Penataan Organisasi



Sasaran 4 : Meningkatnya mutu pelayanan publik		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Penataan Organisasi
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Indeks Kualitas Kebijakan	1.Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 4.Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam



Sasaran 6 : Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Penataan Organisasi 2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sasaran 7 : Meningkatnya tata kelola pengadaan		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Indeks tata kelola pengadaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa



Sasaran 8 : Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Angka Inflasi	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Sasaran 9 : Terpenuhinya HAK masyarakat atas bantuan hukum		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Nilai Peduli HAM	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sasaran 10 : Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Pembahasan lebih lanjut tentang Program dan Kegiatan yang menunjang setiap indikator Renstra 2025-2029 disampaikan pada Sub Bab selanjutnya yaitu Analisis Kinerja Utama.



B. ANALISIS KINERJA UTAMA

Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah proses terukur untuk mengevaluasi efektivitas Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis dan operasional. Analisis ini krusial untuk memantau kemajuan, memastikan penyelarasan tujuan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data guna meningkatkan kinerja dan produktivitas. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, setiap indikator kinerja utama pada Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 dan periode Tahun 2025-2029 dianalisis secara mendalam. Berikut merupakan analisis setiap IKU :

RENSTRA 2021-2026

1.

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif

A. Predikat AKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 77,15 dengan predikat “BB”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis



teknologi informasi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB, 4 (empat) komponen utama evaluasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Berikut merupakan rincian penilaian AKIP Pemerintah Kabupaten Gresik :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2024	2025	SELISIH
1	Perencanaan Kinerja	25,24	23,28	1,96
2	Pengukuran Kinerja	23,72	22,43	1,29
3	Pelaporan Kinerja	13,03	12,94	0,09
4	Evaluasi Internal	18,61	18,50	0,11
Nilai AKIP/Predikat		80,60 (A)	77,15 (BB)	3,45

Penurunan nilai terjadi di seluruh lini evaluasi, dengan poin krusial pada Perencanaan Kinerja yang terkoreksi paling dalam sebesar 1,96 poin (dari 25,24 menjadi 23,28). Hal ini mengindikasikan bahwa dokumen perencanaan tahun 2025 belum mampu menggambarkan strategi pemecahan masalah yang tajam dan selaras antara sasaran strategis dengan penggunaan anggaran. Komponen Pengukuran Kinerja juga menurun sebesar 1,29 poin, yang menandakan adanya kelemahan dalam validitas data pendukung kinerja maupun monitoring berkala.



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Predikat AKIP	83.5	77,15	92,40%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 83,5 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 92,40% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Kegiatan Penataan Organisasi.

Dimana Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan indikator : Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A terealisasi 89%, sedangkan Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator : Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah terealisasi 82,13%. Dengan realisasi program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- Tingginya persentase unit kerja yang meraih nilai SAKIP "A" menciptakan standarisasi tata kelola kinerja yang kuat di seluruh lini organisasi.
- Realisasi sasaran sebesar 82,13% mencerminkan bahwa penataan struktur, tugas, dan fungsi organisasi telah berjalan cukup selaras dengan target yang ditetapkan.



Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 689.981.832,99 terealisasi sebesar Rp. 582.560.559 atau 84,43%.

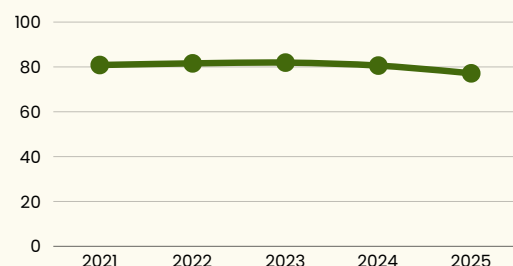


Penyelarasan Dokumen Perencanaan dan
Persiapan Evaluasi SAKIP

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Predikat AKIP	80,86	81,59	81,93	80,6	77,15	Menurun

Berdasarkan realisasi tahun 2021-2025, Predikat AKIP Kabupaten Gresik cenderung memiliki trend menurun. Hal ini menunjukkan



penurunan kualitas akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gresik.



ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Terjadi penurunan nilai pada semua komponen penilaian AKIP. Komponen Perencanaan Kinerja turun 1,96 poin, Komponen Pengukuran Kinerja turun 1,29 poin, Komponen Pelaporan Kinerja turun 0,09 poin dan Komponen Evaluasi Internal turun 0,11 poin.

Dengan adanya penurunan terhadap Predikat AKIP, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

- Koordinasi secara aktif terkait rekomendasi komponen Perencanaan dengan Bappeda dan Evaluasi Internal dengan Inspektorat;
- Melakukan perbaikan pada komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai dengan rekomendasi.



B. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN UMUM

Indeks Kepuasan Pelayanan Umum menunjukkan bahwa nilai sebesar 92,85 dengan predikat “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang diberikan telah memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Sekretariat Daerah dalam menerjemahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan umum ke dalam tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gresik Semester II berikut merupakan rincian Indeks Kepuasan Pelayanan Umum Sekretariat Daerah :

NO	PENILAIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI	KATEGORI
1	Semester I	93,29	Sangat Baik
2	Semester II	92,42	Sangat Baik
Nilai Akhir		92,85	Sangat Baik



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu “Sangat Baik” maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan :

- 1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4.Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8.Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 9.Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah,



Dimana Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan indikator : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi, Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara dan Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti telah terealisasi 100%, sedangkan 9 (sembilan) Kegiatan dengan indikatornya terealisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	NILAI
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Kali
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang dilaksanakan	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang dilaksanakan	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100%



NO	KEGIATAN	INDIKATOR	NILAI
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional yang dilaksanakan	100%
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga yang disediakan	100%

Dengan realisasi program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan proses pelayanan—mulai dari kecepatan, ketepatan, hingga keramahan petugas—telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sehingga Indeks Kepuasan Pelayanan Umum tercapai sesuai target.

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 67.790.222.255,91 terealisasi sebesar Rp. 60.257.181.596,11 atau 88,89%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Umum sebesar 100% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Indeks Kepuasan Pelayanan Umum memiliki kecenderungan trend naik. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan pada Bagian Umum dinilai telah diterapkan sesuai dengan SOP dengan transparansi tinggi serta SDM yang kompeten.



ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan Indeks Kepuasan Pelayanan Umum yaitu :

- Penetapan kebijakan berupa Peraturan Bupati tentang Prosedur Fasilitasi dan Penyediaan Sarana Prasarana bagi Stakeholder Eksternal di Lingkungan Kabupaten Gresik (Perbup No. 82 Th 2025)
- Penetapan SOP Layanan Umum

Dengan tercapainya indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Umum, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

- Melakukan reviu secara berkala terhadap Standar Operasional Prosedur pada Layanan Umum;
- Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga kualitas Pelayanan Publik tetap terjaga



C. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan menunjukkan bahwa nilai sebesar 94,3 dengan predikat “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa standar pelayanan yang diberikan telah memenuhi, bahkan melampaui ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Sekretariat Daerah dalam menerjemahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan keprotokolan ke dalam tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gresik Semester II berikut merupakan rincian Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan Sekretariat Daerah:

NO	PENILAIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	NILAI	KATEGORI
1	Semester I	93,13	Sangat Baik
2	Semester II	95,47	Sangat Baik
Nilai Akhir		94,3	Sangat Baik



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu “Sangat Baik” maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dimana Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator : Presentase Kegiatan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi telah terealisasi 100%, sedangkan 1 (satu) Kegiatan dengan indikator Persentase realisasi kegiatan protokoler, Persentase Kegiatan Pimpinan yang dipublikasikan, dan Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan telah terealisasi 100%.



Dengan realisasi program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan proses pelayanan—mulai dari kecepatan, ketepatan, hingga keramahan petugas—telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan sehingga Indeks Kepuasan Pelayanan Protokol tercapai sesuai target. Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.608.766.910 terealisasi sebesar Rp. 1.454.686.891 atau 90,42%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan sebesar 100% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



Pelayanan Protokol dan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah



PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan memiliki kecenderungan trend naik. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dinilai telah diterapkan sesuai dengan SOP dengan transparansi tinggi serta SDM yang kompeten.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan :

- Pemanfaatan sistem informasi untuk mempermudah koordinasi dan kelancaran kegiatan pimpinan
- Penjadwalan personil yang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kompetensi



Dengan tercapainya indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

- Melakukan revidi secara berkala terhadap Standar Operasional Prosedur pada Layanan Keprotokolan
- Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sehingga kualitas Pelayanan Publik tetap terjaga;



A. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 3.4093. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa pemerintah daerah berada pada tingkat kinerja yang Sedang (berdasarkan standar evaluasi Kemendagri). Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Kunci (IKK), baik pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan, telah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.3	3.4093	103.31%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 3,3 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 103,31% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan :

- 1.Administrasi Tata Pemerintahan
- 2.Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Dimana Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator : Persentase pemenuhan data dukung IKK telah terealisasi 100%, sedangkan 2 (dua) Kegiatan dengan indikatornya terealisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	100%
		Persentase pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi	100%
		Persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah	38,89%
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi	12 MoU



Dengan realisasi program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh capaian kinerja Kabupaten Gresik dapat terverifikasi secara administratif oleh tim penilai pusat (Kemendagri) sehingga mendukung kenaikan nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan intensif kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah.



Pembinaan Intensif bersama APIP terkait pemenuhan IKK

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.449.291.480 terealisasi sebesar Rp. 1.156.627.399 atau 79,81%.

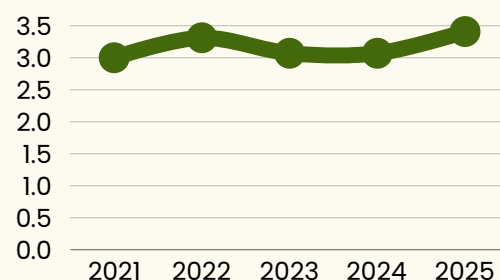
Dengan keberhasilan capaian kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebesar 103,31% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3	3,3121	3,07	3,07	3.4093	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) memiliki kecenderungan trend naik. Hal ini



menunjukkan bahwa efektivitas belanja publik dan kualitas birokrasi di Kabupaten Gresik sedang bergerak ke arah yang lebih baik dan berdampak pada pembangunan daerah secara nyata.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan :

- Melakukan pembinaan intensif kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan Indikator Kinerja Kunci
- Pemanfaatan aplikasi e-LPPD untuk menghimpun data dan informasi IKK



Dengan tercapainya indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

1. Analisis mendalam terhadap seluruh Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing Perangkat Daerah, khususnya terhadap IKK yang belum mencapai nilai maksimal meski skor total sudah mencapai 3,4093
2. Mempertahankan intensitas pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam pemenuhan Indikator Kinerja Kunci.



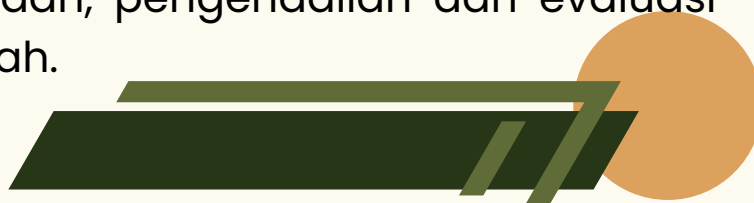
B. PERSENTASE KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DIFASILITASI

Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi menunjukkan nilai sebesar 54,29%. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dimaksud adalah kebijakan terkait Hibah Lembaga dan Tempat Ibadah. Sekretariat Daerah harus memastikan lembaga keagamaan dan tempat ibadah memiliki legalitas dan administrasi yang sesuai untuk menerima akses bantuan.

Berdasarkan pelaksanaan Tahun 2025, berikut merupakan rincian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang direncanakan dan ditetapkan :

NO	KEBIJAKAN	USULAN	PENETAPAN
1	Hibah Lembaga	68	38
2	Hibah Tempat Ibadah	2	0
Jumlah		70	38

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tidak dapat maksimal dikarenakan Sekretariat Daerah menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait mekanisme Belanja Hibah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah.



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100	54.29	54.29%	Rendah

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 100% maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 54,29% dengan kategori “RENDAH”. Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Dimana Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator : Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat telah terealisasi Baik sedangkan 1 (satu) Kegiatan dengan indikator Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun sebesar 100 rancangan kebijakan

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.030.675.355 terealisasi sebesar Rp. 18.304.133.973 atau 48,13%.

Dengan realisasi program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kinerja Program

dan Kegiatan dinilai baik, namun belum maksimal dalam menunjang kinerja Sekretariat Daerah untuk mencapai target Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya rekomendasi KPK terkait mekanisme Belanja Hibah.

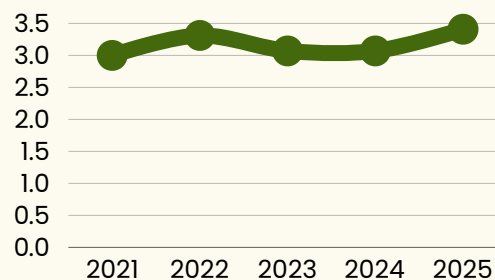


Monitoring Penerima Hibah
(Lembaga Keagamaan)

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	95,45%	100%	138,59	67,62%	54.29	Menu-run

Berdasarkan realisasi
Tahun 2021-2025,
Persentase kebijakan
kesejahteraan rakyat yang
difasilitasi memiliki
kecenderungan



menunjukkan bahwa efektivitas belanja publik dan kualitas birokrasi di Kabupaten Gresik sedang bergerak ke arah yang lebih baik dan berdampak pada pembangunan daerah secara nyata.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penghambat indikator Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi yaitu menghentikan Belanja Hibah guna menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait mekanisme Belanja Hibah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah.

Dengan belum tercapainya indikator Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

1. Koordinasi secara intensif dengan Bappeda terkait mekanisme Belanja Hibah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah.
2. Membuka layanan konsultasi khusus (desk) untuk membantu pengurus tempat ibadah menyusun proposal sesuai regulasi;
3. Melakukan kunjungan ke kecamatan/desa untuk verifikasi faktual secara kolektif di lokasi;
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala



C. PERSENTASE PRODUK HUKUM YANG DITETAPKAN

Persentase Produk Hukum yang ditetapkan menunjukkan nilai sebesar 90,76%. Realisasi ini mencakup akumulasi penyelesaian berbagai instrumen hukum yang menjadi fondasi operasional pemerintahan, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Keputusan Bupati, Keputusan Sekretariat Daerah, Surat Edaran (SE), hingga kesepakatan strategis dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU).

Berdasarkan pelaksanaan Tahun 2025, berikut merupakan rincian Produk Hukum yang diusulkan dan ditetapkan :

NO	PRODUK HUKUM	USULAN	PENETAPAN
1	Peraturan Daerah	14	14
2	Peraturan Bupati	133	106
3	Keputusan Bupati	747	685
4	Keputusan Sekretariat Daerah	24	24
5	Surat Edaran	25	25
6	<i>Memorandum of Understanding</i>	20	20
Jumlah		963	874



Berdasarkan tabel di atas, produk hukum yang ditetapkan tidak dapat maksimal dikarenakan terdapat Produk Hukum yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga tidak bisa ditetapkan. Produk Hukum yang tidak memenuhi syarat administrasi dikembalikan kepada Perangkat Daerah.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	98.7	90.76	91.95%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 98,7% maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 91,95% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Dimana Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator : Persentase Perda yang diproses dengan realisasi 100%, Persentase Perbup yang diproses dengan realisasi 79,7%, dan Persentase Keputusan Bupati yang diproses dengan realisasi 91,7%. Sedangkan 1 (satu) Kegiatan dengan indikator :



1. Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah terealisasi sebesar 100%; dan
2. Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terealisasi level 5.



Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Bupati

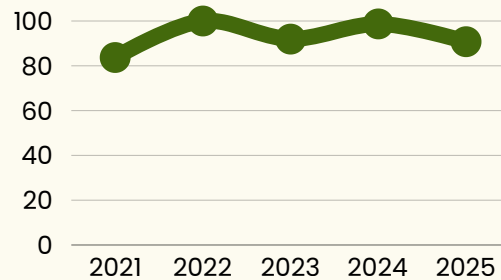
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 933.775.960 terealisasi sebesar Rp. 761.222.153 atau 81,52%. Dengan keberhasilan capaian kinerja Persentase Produk Hukum yang ditetapkan sebesar 91,95% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	83,70%	100%	91,92%	98,70%	90,76	Menu-run



Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Persentase Produk Hukum yang ditetapkan memiliki kecenderungan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa



belumnya pemahaman yang mendalam tentang kelengkapan administrasi penetapan Produk Hukum, sehingga usulan Produk Hukum yang diajukan tidak semuanya bisa diproses hingga tahap penetapan.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan : Terdapat Produk Hukum yang belum memenuhi syarat administrasi sehingga tidak bisa ditetapkan.

Dengan belum tercapainya indikator Persentase Produk Hukum yang ditetapkan, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

1. Pemberian pemahaman kepada Perangkat Daerah pengusul Produk Hukum terkait kelengkapan administrasi melalui sosialisasi atau Surat Edaran;
2. Penyelenggaraan bimbingan teknis Policy Brief kepada Analis Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.



D. NILAI PEDULI HAM

Nilai Peduli HAM menunjukkan nilai sebesar 90,95. Nilai ini menempatkan daerah pada kategori "Peduli HAM" (kategori tertinggi), yang mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Hasil Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, berikut merupakan rincian nilai Peduli HAM :

NO	PARAMETER PENILAIAN	NILAI
A	KELOMPOK HAK	
1	Hak Atas Bantuan Hukum	100
2	Hak Atas Informasi	100
3	Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	80
4	Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme	40
5	Hak Atas Kependudukan	95
6	Hak Atas Kesehatan	87,5
7	Hak Atas Pendidikan	83



NO	PARAMETER PENILAIAN	NILAI
8	Hak Atas Pekerjaan	69
9	Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak	95
10	Hak Perempuan dan Anak	60
Rata-rata Nilai Sub Kelompok A		80,95
B	IMPLEMENTASI AKSI HAM	10
Sub Total Nilai Kelompok B		10
C	PENGURANGAN NILAI	0
D	TOTAL NILAI	90,95
E	KRITERIA : PEDULI HAM	

Berdasarkan tabel di atas, prinsip Hak Asasi Manusia telah menjadi ruh dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan di Bappeda hingga eksekusi di lapangan oleh perangkat daerah. Kabupaten Gresik melihat HAM sebagai standar kualitas pelayanan. Setiap kebijakan yang diterbitkan telah melalui proses filtrasi agar tetap selaras dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
4	Nilai Peduli HAM	96	90.95	94.74%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 96 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 94,74% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Dimana Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator : Persentase Perda yang diproses dengan realisasi 100%, Persentase Perbup yang diproses dengan realisasi 79,7%, dan Persentase Keputusan Bupati yang diproses dengan realisasi 91,7%. Sedangkan 1 (satu) Kegiatan dengan indikator Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dengan realisasi 31 perkara dan jumlah peserta yang disuluh dengan realisasi 60 orang.





Rapat Koordinasi
Persiapan Penilaian
Kabupaten Peduli HAM
Tahun 2025

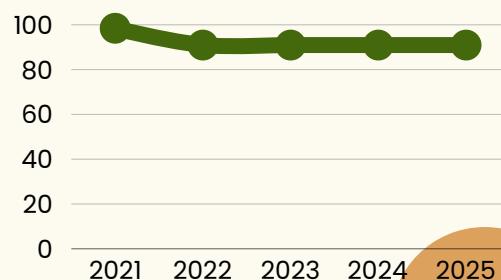
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 596.800.000 terealisasi sebesar Rp. 420.484.612 atau 70,46%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja Nilai Peduli HAM sebesar 94,74% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	Nilai Peduli HAM	N/A	98,45	90.95	90.95	90.95	Menu-run

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Nilai Peduli HAM memiliki kecenderungan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja



dalam upaya menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penghambat indikator Nilai Peduli HAM : Terdapat data dukung pada parameter penilaian yang kurang terpenuhi.

Dengan tercapainya indikator Nilai Peduli HAM, Sekretariat Daerah perlu melakukan penyempurnaan pada indikator-indikator yang belum mencapai poin sempurna, guna memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal (leave no one behind) dalam pembangunan daerah.



A. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)

Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP) Kabupaten Gresik menunjukkan level 3. Keberhasilan meraih Level 3 (Proaktif) menandakan bahwa UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) tidak lagi hanya bekerja saat ada permintaan (reaktif), tetapi telah mampu melakukan analisis kebutuhan, riset pasar, dan perencanaan yang terintegrasi. Dengan berada di Level 3, Pemerintah Daerah telah berhasil menekan potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi proses. Penggunaan E-Katalog Lokal dan Toko Daring menjadi bukti nyata dukungan terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta pengutamaan Produk Dalam Negeri (PDN), yang merupakan mandat strategis nasional.

Berdasarkan Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh LKPP, berikut merupakan rincian nilainya:



NO	DOMAIN	VARIABEL	TINGKAT KEMATANGAN
1	Proses	Manajemen Pengadaan	3
		Manajemen Penyedia	3
		Manajemen Kinerja	3
		Manajemen Risiko	3
2	Kelembagaan	Pengorganisasian	3
		Tugas dan fungsi	3
3	SDM	Perencanaan SDM	3
		Pengembangan SDM	3
4	Sistem Informasi	Sistem Informasi	3
TINGKAT KEMATANGAN			3

Dengan Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa level 3 merefleksikan bahwa tata kelola PBJ di Kabupaten Gresik telah memenuhi standar kematangan yang mencakup:

- Organisasi yang Stabil: UKPBJ telah berdiri sebagai pusat keunggulan (Center of Excellence) dengan struktur mandiri dan fungsi yang jelas.



- SDM Kompeten: Personel pengadaan memiliki sertifikasi keahlian dan pola pengembangan karier yang terukur, sehingga meminimalisir risiko kesalahan prosedur.
- Proses Bisnis Terstandarisasi: Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pendukungnya berjalan secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	4	3	75.00%	Sedang

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 4 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 75% dengan kategori "SEDANG". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.



Dimana Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa dengan realisasi 87,6,. Sedangkan 1 (satu) Kegiatan dengan indikator Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dilaksanakan dengan realisasi 100% dan Tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa dengan realisasi level 5.



Penguatan Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.575.919,6 terealisasi sebesar Rp. 425.227.078 atau 87,21%

Dengan capaian kinerja indikator Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 75% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap belum berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP) memiliki kecenderungan trend naik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen kuat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih (good governance) dan bebas dari korupsi.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang indikator Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP) :

- Kurangnya kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa
- Belum dilakukan sosialisasi tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Aparat Penegak Hukum
- Kurangnya jumlah Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa



Dikarenakan indikator Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa belum tercapai, Sekretariat Daerah perlu melakukan :

1. Peningkatan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa
2. Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa bersama Aparat Penegak Hukum
3. Penambahan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa



B. RATA-RATA CAPAIAN KINERJA BUMD

Rata-rata capaian kinerja BUMD Kabupaten Gresik menunjukkan nilai 191,58%. Angka ini merupakan hasil konsolidasi dari tiga pilar utama BUMD Kabupaten Gresik, yaitu Perumda Giri Tirta, PT Gresik Migas, dan Perumda BPR Bank Gresik. Pencapaian ini berarti target-target yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan berhasil dilampaui jauh di atas ekspektasi awal. Hal ini sering kali dipicu oleh efisiensi operasional atau lonjakan pendapatan di sektor tertentu.

Berikut merupakan rician Target dan Realisasi Kinerja BUMD Tahun 2025

NO	BUMD	TARGET	REALISASI	%
1	Giri Tirta	343.992.217.000	275.772.118.970	80,17
2	PT. Gresik Migas	635.000.000	2.633.813.041	414,77
3	BPR Bank Gresik	11.688.219.301	9.327.682.191	79,80
Rata-Rata Capaian Kinerja BUMD				191,58

Berdasarkan tabel di atas, kinerja PT. Gresik Migas menjadi kontributor terbesar dalam pencapaian indikator Rata-rata capaian kinerja BUMD, disusul Giri Tirta dan BPR Bank Gresik. Hal ini bisa terjadi karena PT Gresik Migas berfokus pada penyediaan bahan bakar minyak sektor ritel dan pengelolaan infrastruktur



energi daerah melalui operasional 2 unit SPBUN dan 1 unit Pertashop. Sedangkan BPR Bank Gresik mampu mempertahankan predikat bank sehat dengan tata kelola yang kuat, dibuktikan dengan raihan penghargaan Indonesian Platinum Award 2025 kategori "The Best Performance Bank with Good Corporate Governance of The Year". Di sisi lain, Giri Tirta menerima penghargaan Radar Surabaya Award Tahun 2025 untuk komitmen pelayanan dan upaya manajemen dalam melakukan digitalisasi layanan serta penanganan keluhan pelanggan secara lebih responsif dibandingkan periode sebelumnya.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	88.59	191.58	110.00%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 88,59% maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 216,25% dinormalisasi menjadi 110% (berdasarkan PermenPANRB No. 22 Tahun 2024) dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.



Dimana Program Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator : Nilai Evaluasi Kinerja TPID dengan realisasi 67,9. Sedangkan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan indikator Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian terealisasi 2 kebijakan dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan indikator Jumlah Kebijakan Bidang SDA Yang ditetapkan terealisasi 1 kebijakan.



Penghargaan dan Kegiatan Usaha yang dilakukan BUMD

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 722.123.866 terealisasi sebesar Rp. 437.310.299 atau 60,56%.

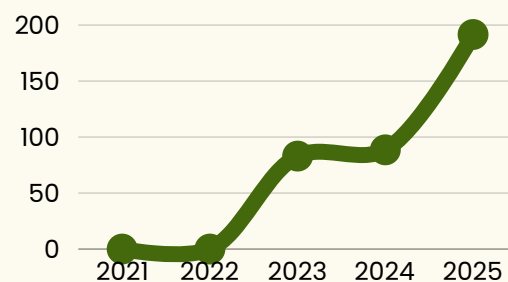
Dengan keberhasilan capaian kinerja Rata-rata capaian kinerja BUMD sebesar 110% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	N/A	N/A	83%	88,59%	191.58	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD memiliki kecenderungan trend naik. Hal ini menunjukkan



bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah daerah di wilayah tersebut secara kolektif mengalami perbaikan performa, baik dari segi keuangan maupun operasional.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang indikator Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD :

1. Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja BUMD secara intensif
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Bisnis BUMD
3. Penguatan BUMD melalui penetapan kebijakan penyertaan modal BUMD (Perda No. 10 Th 2025)



Dengan tercapainya indikator rata-rata capaian kinerja BUMD, Sekretariat Daerah perlu melakukan :

1. Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja BUMD secara intensif
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Bisnis BUMD
3. Penguatan BUMD melalui implementasi kebijakan penyertaan modal BUMD (Perda No. 10 Th 2025)



C. PERSENTASE CAPAIAN KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH

Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan nilai 91,30%. Tercatat sebanyak 42 Perangkat Daerah mampu meraih capaian kinerja APBD minimal 80%. Angka ini mencerminkan efektivitas dan kepatuhan Perangkat Daerah dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	92	91.30	99.24%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 92% maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 99,24% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.



Dimana Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator : Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan dengan realisasi 100%. Sedangkan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan indikator :

- Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah terealisasi 5 rumusan kebijakan;
- Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terealisasi 4 kali.



Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD dan
Penyusunan Standar Harga

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 811.864.863,5 terealisasi sebesar Rp. 556.730.909 atau 68,57%.

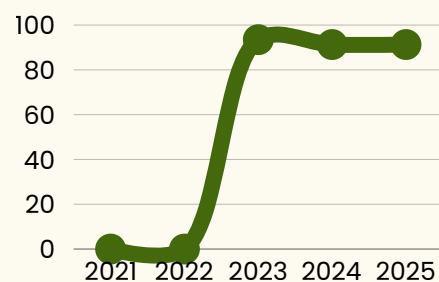
Dengan keberhasilan capaian kinerja Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah sebesar 99,24% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	N/A	N/A	93,48%	91,30%	91.30	Menu-run

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, R Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah memiliki kecenderungan trend menurun. Hal ini



menunjukkan bahwa masih ada Perangkat Daerah yang gagal membelanjakan APBD sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penghambat indikator Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah :

1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembatasan belanja daerah
2. Kurangnya komitmen penyedia dalam penyelesaian kontrak
3. Menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait Belanja Hibah sehingga sebagian dana hibah tidak direalisasikan



Dengan belum tercapainya indikator Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah perlu melakukan :

1. Pengawasan secara intens terhadap pelaksanaan pekerjaan
2. Perencanaan belanja hibah dengan lebih selektif



1.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

IKU : Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP

Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP menunjukkan nilai sebesar 0,96. Terdapat 44 Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80 atau predikat A. Capaian ini menandakan bahwa hampir seluruh instansi di Kabupaten Gresik tidak hanya mampu membelanjakan anggaran, tetapi juga mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan telah akuntabel.



Dengan 44 instansi yang berada di level "A", Kabupaten Gresik memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat efektivitas birokrasi tertinggi, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80	0.87	0.96	110.00%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 0,87 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 110% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 2 (dua) Program dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah dan Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Kegiatan Penataan Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

Dimana Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan indikator : Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A terealisasi 89%, sedangkan Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator : Persentase ketercapaian sasaran kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah terealisasi 82,13%. Sedangkan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator : Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan dengan realisasi 100%. Sedangkan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan indikator :



1. Jumlah Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah terealisasi 5 rumusan kebijakan;
2. Jumlah pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terealisasi 4 kali.

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 984.360.321,75 terealisasi sebesar Rp. 702.371.048,75 atau 71.35%.



Penyelarasan dokumen Perencanaan dengan Bappeda, Inspektorat dan Sekretariat Daerah



Penguatan dokumen SAKIP dan Persiapan Evaluasi SAKIP

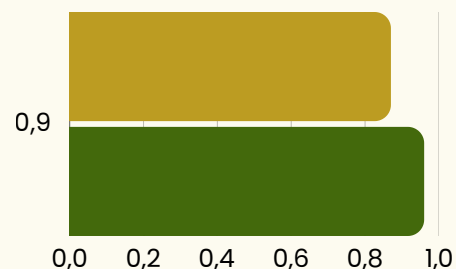
Dengan keberhasilan capaian kinerja Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sebesar 110% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP	0,87	0.96	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2024–2025, Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP memiliki kecenderungan trend meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik meningkat dari tahun sebelumnya.



ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penghambat indikator Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP :

- 1.Melakukan asistensi kepada seluruh Perangkat Daerah secara intensif
- 2.Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIAKRI dalam penyusunan dokumen SAKIP



Dengan tercapainya indikator Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP, Sekretariat Daerah perlu melakukan pendampingan intensif pada 2 Perangkat Daerah yang saat ini masih memiliki nilai di bawah 80 untuk mengidentifikasi hambatan spesifik masing-masing Perangkat Daerah.



IKU : Nilai LPPD

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 3.4093. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada pada tingkat kinerja yang Sedang (berdasarkan standar evaluasi Kemendagri). Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Indikator Kinerja Kunci (IKK), baik pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan, telah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Nilai LPPD	3.3	3.4093	103.31%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 3,3 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 103,31% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Program Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan :

- 1.Administrasi Tata Pemerintahan
- 2.Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Dimana Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator : Persentase pemenuhan data dukung IKK telah terealisasi 100%, sedangkan 2 (dua) Kegiatan dengan indikatornya terealisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	REALISASI
1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase data dukung IKK yang diverifikasi	100%
		Persentase pelayanan terpadu kecamatan yang difasilitasi	100%
		Persentase kecamatan yang dilakukan perapatan batas wilayah	38,89%
2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi	12 MoU

Dengan realisasi program dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh capaian kinerja Kabupaten Gresik dapat terverifikasi secara administratif oleh tim penilai pusat (Kemendagri) sehingga mendukung kenaikan nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan intensif kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan Indikator Kinerja Kunci yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah.





Pembinaan Intensif bersama APIP terkait pemenuhan IKK

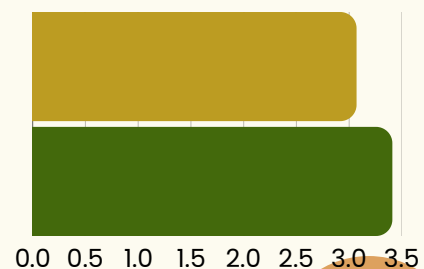
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.370.345.873 terealisasi sebesar Rp. 1.102.635.221 atau 80,46%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebesar 103,31% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
2	Nilai LPPD	3,07	3.4093	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Nilai LPPD memiliki kecenderungan trend meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja publik dan



dan kualitas birokrasi di Kabupaten Gresik sedang bergerak ke arah yang lebih baik dan berdampak pada pembangunan daerah secara nyata.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Nilai LPPD :

- Melakukan pembinaan intensif kepada Perangkat Daerah terkait pemenuhan Indikator Kinerja Kunci
- Pemanfaatan aplikasi e-LPPD untuk menghimpun data dan informasi IKK

Dengan tercapainya indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

1. Analisis mendalam terhadap seluruh Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing Perangkat Daerah, khususnya terhadap IKK yang belum mencapai nilai maksimal meski skor total sudah mencapai 3,4093
2. Mempertahankan intensitas pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam pemenuhan Indikator Kinerja Kunci.



IKU : Hasil Evaluasi Kelembagaan

Hasil Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 96,7. Nilai ini menunjukkan bahwa instansi tersebut telah berhasil mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses sesuai dengan mandat Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018. Berikut merupakan rincian Dimensi Hasil Evaluasi Kelembagaan Kabupaten Gresik :

NO	DIMENSI	SKOR
1	Kompleksitas	24,107
2	Formalitas	12,5
3	Sentralisasi	11,08
TOTAL		47,687
1	Alignment	9,6875
2	Governance and Compliance	10
3	Perbaikan dan Peningkatan Proses	9,375



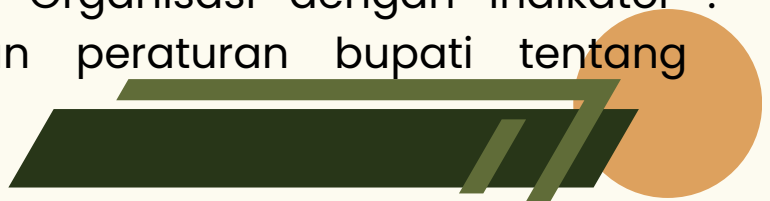
NO	DIMENSI	SKOR
4	Manajemen Risiko	10
5	Teknologi Organisasi IT	10
TOTAL		49,063
Peringkat Komposit		96,749

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	96.8	96.7	99.90%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 96,8, maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 99,90% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah, serta Kegiatan Penataan Organisasi.

Dimana Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan indikator : Indeks Integritas Jabatan/Organisasi terealisasi 3,22, sedangkan Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator : Jumlah rancangan peraturan bupati tentang



perangkat daerah terealisasi 8 rancangan peraturan bupati.



Rapat One Week Programme dan Evaluasi
Perangkat Daerah

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.495.458,25 terealisasi sebesar Rp. 145.640.139,75 atau 84,43%.

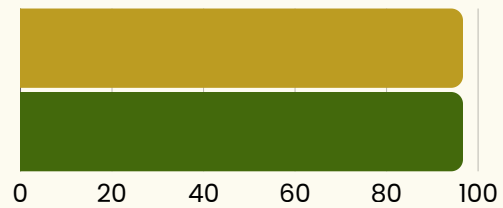
Dengan keberhasilan capaian kinerja Hasil Evaluasi Kelembagaan, sebesar 99,9% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap belum berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Hasil Evaluasi Kelembagaan	96.7	96.7	Nilai 2025 sama dengan 2024

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Nilai LPPD memiliki kecenderungan trend meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini berada di kategori "Sangat Efektif" atau "Memuaskan".

Artinya, struktur organisasi dan tata kerja di instansi tersebut dinilai sudah sangat matang dan sehat.



ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Hasil evaluasi kelembagaan masih menggunakan nilai tahun 2024 dikarenakan terdapat perubahan formulasi perhitungan di Tahun 2025, sehingga nilai masih menggunakan nilai Tahun sebelumnya.

Dengan tercapainya indikator Hasil Evaluasi Kelembagaan, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

1. penelaahan berkala terhadap Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih fungsi (overlapping) antar unit kerja baru;
2. evaluasi beban kerja secara tahunan untuk memastikan jumlah personel tetap proporsional dengan mandat organisasi yang dinamis.



IKU : Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik

Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 91,59 dengan opini “Kualitas Tertinggi”. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah memenuhi standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Skor ini mencerminkan komitmen kuat dalam meminimalisir praktik maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, maupun tindakan tidak patut.

Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Opini Ombudsman RI : Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025, klasifikasi Opini “Kualitas Tertinggi” yang diterima Kabupaten Gresik berarti Kualitas Pelayanan Sangat Baik dan Tidak ada produk pengawasan. Tidak ada produk pengawasan adalah penyelenggara yang tidak menerima produk Pengawasan Ombudsman dalam periode yang diatur dalam Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	96	91,59	95,41%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 96, maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 95,41% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah, serta Kegiatan Penataan Organisasi.

Dimana Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan indikator : Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah terealisasi 89,85, sedangkan Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator : Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik" terealisasi 81 Unit Pelayanan Publik.





Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pendampingan Evaluasi Maladministrasi Pelayanan Publik

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 172.495.458,25 terealisasi sebesar Rp. 145.640.139,75 atau 84,43%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 95,41% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap belum berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	95.88	91,59	Menurun

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kecenderungan trend menurun. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik sedang mengalami penurunan.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah Sekretariat Daerah melakukan asistensi secara intensif kepada Unit Pelayanan Publik

Dengan tercapainya indikator Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan setiap tindakan korektif yang terkandung dalam Laporan Akhir Pemeriksaan (LHP) dan Rekomendasi, Saran Perbaikan dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Saran Penyempurnaan dalam Hasil Opini yang diberikan oleh Ombudsman RI.



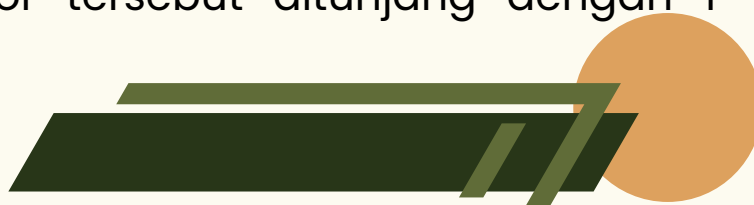
IKU : Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 82,85. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik tidak lagi menyusun regulasi secara reaktif. Setiap Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) didahului dengan penyusunan Naskah Akademik yang kuat. Efektivitas ini juga didukung oleh integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Gresik, yang memudahkan akses publik terhadap produk hukum.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Kualitas Kebijakan	84.5	82.85	98.05%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 84,5, maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 98,05% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program



dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Dimana Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator : Persentase Perda yang diproses dengan realisasi 100%, Persentase Perbup yang diproses dengan realisasi 79,7%, Persentase Keputusan Bupati yang diproses dengan realisasi 91,7%, dan Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat telah terealisasi Baik.

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan indikator :

- Persentase rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi peraturan daerah terealisasi sebesar 100%;
- Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terealisasi level 5;
- Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dengan realisasi 31 perkara; dan
- Jumlah peserta yang disuluh dengan realisasi 60 orang.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun sebesar 100 rancangan kebijakan





Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Bupati

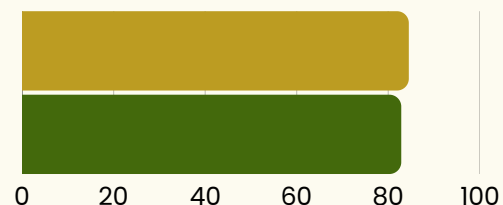
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.346.860.757 terealisasi sebesar Rp. 19.186.203.732,50 atau 48,76%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 98,05% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap belum berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks Kualitas Kebijakan	84,5	82,85	Menurun

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Indeks Kualitas Kebijakan memiliki kecenderungan trend menurun. Hal ini



proses penyusunan dan pengelolaan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Gresik mengalami kemunduran kualitas.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penghambat indikator Indeks Kualitas Kebijakan adalah Terdapat regulasi baru yang implementasinya belum dilaksanakan secara keseluruhan.

Dengan tercapainya indikator Indeks Kualitas Kebijakan, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan :

- 1.sosialisasi dan sinkronisasi regulasi baru ke semua stakeholder secara berkelanjutan;
- 2.Pembdayaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di setiap OPD untuk menyusun Policy Brief atau Policy Paper.



IKU : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan nilai sebesar 89,85 dengan kategori “SANGAT BAIK”. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat atau pengguna layanan merasa puas dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik. Berdasarkan Laporan Hasil Survei Keluasan Masyarakat Semester II Tahun 2025, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1.89 UPP sudah melaksanakan SKM dari Aplikasi SuKMa-e diantaranya ada 1 UPP yang melaksanakan survey dengan responden terendah yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2.Tiga UPP belum mengirimkan laporan SKM pada semester II tahun 2025 yaitu Puskesmas Aloon-aloon, Dinas Kesehatan dan Kecamatan Tambak



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88.23	89.85	101.84%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 88,23, maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 101,84% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah, serta Kegiatan :

1. Penataan Organisasi,
2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah





Persiapan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Dimana Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan indikator : Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah terealisasi 89,85, sedangkan

1. Kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator : Jumlah Unit Pelayanan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik" terealisasi 81 Unit Pelayanan Publik;
2. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan indikator Persentase realisasi kegiatan protokoler, Persentase Kegiatan Pimpinan yang dipublikasikan, dan Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan telah terealisasi 100%;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan



- Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah seluruh indikator kegiatan ini telah tercapai 100%.

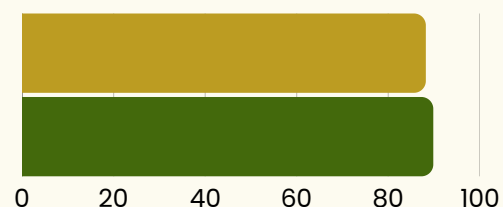
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.650.430.231,16 terealisasi sebesar Rp. 61.911.500.804,86 atau 88,89%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 98,05% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap belum berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88,22	89.85	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah memiliki kecenderungan trend meningkat. Hal ini



Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Gresik dinilai telah diterapkan sesuai dengan SOP dengan transparansi tinggi serta SDM yang kompeten.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah melakukan asistensi secara intensif kepada Unit Pelayanan Publik.

Dengan tercapainya indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat setiap Unit Pelayanan Publik secara berkala dan menyusun Laporan Tindaklanjut Survei Kepuasan Masyarakat.



IKU : Indeks tata kelola pengadaan

Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan nilai sebesar 89,85. Skor ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil menjalankan proses pengadaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya dengan :

1. Tingkat kepatuhan yang tinggi dalam penggunaan alat digital seperti SiRUP, E-Tendering, dan E-Purchasing
2. sebagian besar pengelola pengadaan telah memiliki sertifikasi keahlian yang dipersyaratkan dan jabatan fungsional yang kompeten.
3. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sudah bersifat proaktif (Level 3) dan berfungsi secara permanen untuk mendukung efektivitas pengadaan.



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks tata kelola pengadaan	77	85.66	110.00%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 77 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 111,25% dinormalisasi menjadi 110% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Dimana Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa dengan realisasi 87,6,. Sedangkan 1 (satu) Kegiatan dengan indikator Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang dilaksanakan dengan realisasi 100% dan Tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa dengan realisasi level 5.





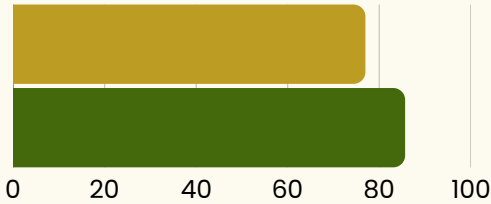
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 487.575.919,6 terealisasi sebesar Rp. 425.227.078 atau 87,21%

Dengan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah sebesar 110% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks tata kelola pengadaan	76,98	85.66	Meningkat

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Indeks tata kelola pengadaan memiliki kecenderungan trend meningkat. Hal ini



menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengelola uang negara secara akuntabel, efektif, dan efisien melalui sistem pengadaan yang bersih.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Indeks tata kelola pengadaan :

1. Adanya penambahan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa
2. Sosialisasi dan Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait SIRUP, eKatalog, Tender dan Non Tender
3. Kewajiban penggunaan ekatalog yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati

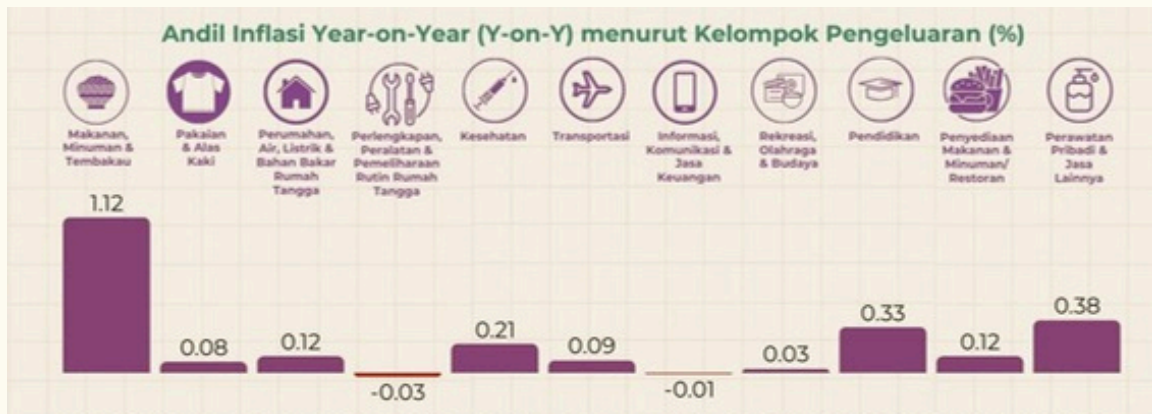
Dikarenakan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah belum tercapai, Sekretariat Daerah perlu melakukan :

1. Sosialisasi dan Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait SIRUP, eKatalog, Tender dan Non Tender
2. Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Kewajiban penggunaan ekatalog



IKU : Angka Inflasi

Angka Inflasi menunjukkan nilai sebesar 2,44. Angka ini menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menjaga stabilitas harga di Kabupaten Gresik. Angka ini membuktikan bahwa sinergi antara kebijakan moneter dan langkah konkret Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif. Dengan inflasi yang terkendali di bawah 3%, daya beli masyarakat tetap terjaga, sementara produsen masih memiliki ruang untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Kondisi ini menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



Berdasarkan bagan di atas, penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 1,12%, Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,38% dan Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,33%. Hal ini disebabkan

oleh kenaikan harga komoditas pangan pokok (seperti beras, aneka cabai, atau daging) dan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, kenaikan gaya hidup masyarakat, serta adanya efek pengganda Sektor Kuliner karena harga pangan pokok naik sehingga pelaku bisnis kuliner menaikkan harga jual produk.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Angka Inflasi	3.5	2.44	110.00%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 3,5 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 130,28% dinormalisasi menjadi 110% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Dimana Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator : Nilai Evaluasi Kinerja TPID dengan realisasi 67,9. Sedangkan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan indikator Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian terealisasi 2

kebijakan dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan indikator Jumlah Kebijakan Bidang SDA Yang ditetapkan terealisasi 1 kebijakan.

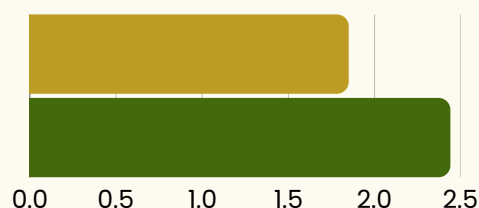
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.613.222 terealisasi sebesar Rp. 73.046.961 atau 85,32%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja Angka Inflasi sebesar 110% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Angka Inflasi	1,85	2.44	Menurun

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Angka Inflasi memiliki kecenderungan trend menurun. Hal ini



menunjukkan bahwa kinerja IPD Pemerintah Kabupaten Gresik belum memberikan pengaruh signifikan terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Gresik.



ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penunjang keberhasilan indikator Angka Inflasi :

1. Penyelenggaraan rapat rutin mingguan, High Level Meeting
2. Fokus pada pelaksanaan 5 indikator penanganan inflasi
3. Sinkronisasi program pengendalian inflasi dengan BPS (Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi)

Dengan tercapainya indikator Angka Inflasi, Sekretariat Daerah perlu melakukan :

1. Penyelenggaraan rapat rutin mingguan, High Level Meeting
2. Fokus pada pelaksanaan 5 indikator penanganan inflasi
3. Sinkronisasi program pengendalian inflasi dengan BPS (Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi)



IKU : Nilai Peduli HAM

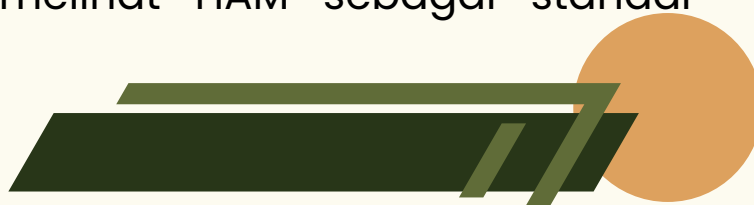
Nilai Peduli HAM menunjukkan nilai sebesar 90,95. Nilai ini menempatkan daerah pada kategori "Peduli HAM" (kategori tertinggi), yang mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Hasil Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, berikut merupakan rincian nilai Peduli HAM :

NO	PARAMETER PENILAIAN	NILAI
A	KELOMPOK HAK	
1	Hak Atas Bantuan Hukum	100
2	Hak Atas Informasi	100
3	Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan	80
4	Hak Atas Keberagaman dan Pluralisme	40
5	Hak Atas Kependudukan	95

NO	PARAMETER PENILAIAN	NILAI
6	Hak Atas Kesehatan	87,5
7	Hak Atas Pendidikan	83
8	Hak Atas Pekerjaan	69
9	Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak	95
10	Hak Perempuan dan Anak	60
Rata-rata Nilai Sub Kelompok A		80,95
B	IMPLEMENTASI AKSI HAM	10
Sub Total Nilai Kelompok B		10
C	PENGURANGAN NILAI	0
D	TOTAL NILAI	90,95
E	KRITERIA : PEDULI HAM	

Berdasarkan tabel di atas, prinsip Hak Asasi Manusia telah menjadi ruh dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan di Bappeda hingga eksekusi di lapangan oleh perangkat daerah. Kabupaten Gresik melihat HAM sebagai standar



kualitas pelayanan. Setiap kebijakan yang diterbitkan telah melalui proses filtrasi agar tetap selaras dengan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Nilai Peduli HAM	90.96	90.95	99.99%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 96 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 94,74% dengan kategori “SANGAT TINGGI”. Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

Dimana Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator : Persentase Perda yang diproses dengan realisasi 100%, Persentase Perbup yang diproses dengan realisasi 79,7%, dan Persentase Keputusan Bupati yang diproses dengan realisasi 91,7%. Sedangkan 1 (satu) Kegiatan dengan indikator Jumlah perkara hukum yang terselesaikan dengan realisasi 31 perkara dan jumlah peserta yang disuluh dengan realisasi 60 orang.





Rapat Koordinasi
Persiapan Penilaian
Kabupaten Peduli HAM
Tahun 2025

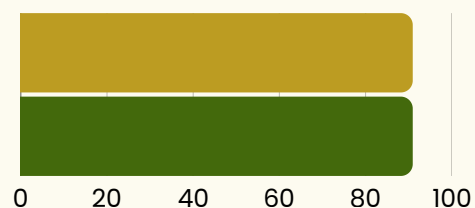
Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 765.287.980 terealisasi sebesar Rp. 590.853.382,50 atau 77,21%.

Dengan keberhasilan capaian kinerja Nilai Peduli HAM sebesar 94,74% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Nilai Peduli HAM	90.95	90.95	Nilai sama dengan 2024

Berdasarkan realisasi Tahun 2024-2025, Nilai Peduli HAM memiliki kecenderungan trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja



dalam upaya menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penghambat indikator Nilai Peduli HAM : Terdapat data dukung pada parameter penilaian yang kurang terpenuhi.

Dengan tercapainya indikator Nilai Peduli HAM, Sekretariat Daerah perlu melakukan penyempurnaan pada indikator-indikator yang belum mencapai poin sempurna, guna memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal (leave no one behind) dalam pembangunan daerah.



IKU : Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menunjukkan nilai sebesar 4,58. Nilai ini menempatkan Kabupaten Gresik pada predikat "Sangat Baik". Kabupaten Gresik dinilai telah berhasil menciptakan ekosistem di mana modal usaha tersedia, tabungan masyarakat terjamin, dan instrumen keuangan digital telah menjadi bagian dari gaya hidup ekonomi warga.

Hal ini ditunjang dengan adanya Gerakan Gemar Menabung oleh Bupati Gresik. Gerakan Gemar Menabung menyasar pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Dengan mendorong ribuan siswa di Gresik membuka rekening tabungan simpanan pelajar (SimPel), Pemerintah Kabupaten Gresik secara langsung meningkatkan angka Inklusi Keuangan. Hal ini berkontribusi besar pada pilar "Ketersediaan Akses" dalam IKAD



PERBANDINGAN TARGET DAN ANALISIS PROGRAM KEGIATAN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4.62	4.58	99.13%	Sangat Tinggi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 4,62 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 99,13% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Pencapaian indikator tersebut ditunjang dengan 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Dimana Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator : Nilai Evaluasi Kinerja TPID dengan realisasi 67,9. Sedangkan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan indikator Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian terealisasi 2 kebijakan.

Selain itu, pencapaian indikator ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.613.222 terealisasi sebesar Rp. 73.046.961 atau 85.32%.

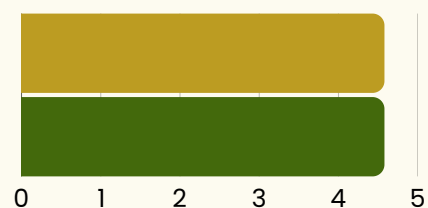
Dengan keberhasilan capaian kinerja Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebesar 99,13% serta realisasi Program dan Kegiatan yang telah mencapai target, Sekretariat Daerah dianggap belum berhasil dalam mencapai kinerja utamanya.



PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Indikator Kinerja Utama	REALISASI		KET
		BASELINE (2024)	2025	
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4.58	4.58	Nilai 2025 sama dengan 2024. Nilai belum diumumkan.

Berdasarkan realisasi Tahun 2021-2025, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) memiliki kecenderungan



trend menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik telah berhasil membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan modern. Tantangan ke depan yang perlu dijaga adalah Literasi Keuangan (memastikan masyarakat tidak hanya punya akses, tetapi juga paham risiko agar terhindar dari investasi bodong atau jeratan pinjol ilegal) serta keamanan siber pada transaksi digital.

ANALISIS KEGAGALAN/KEBERHASILAN DAN TINDAKLANJUT

Faktor penghambat indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD): Belum optimalnya implementasi Surat Edaran tentang Gerakan Gemar Menabung



- 1.Sosialisasi Gerakan Gemar Menabung secara intensif
- 2.Penerbitan Surat Edaran tentang penggunaan QRIS, transaksi non tunai



A decorative graphic consisting of several concentric, semi-circular arcs in a light gray color, positioned behind the main title bar.

BAB IV

PENUTUP

PENUTUP



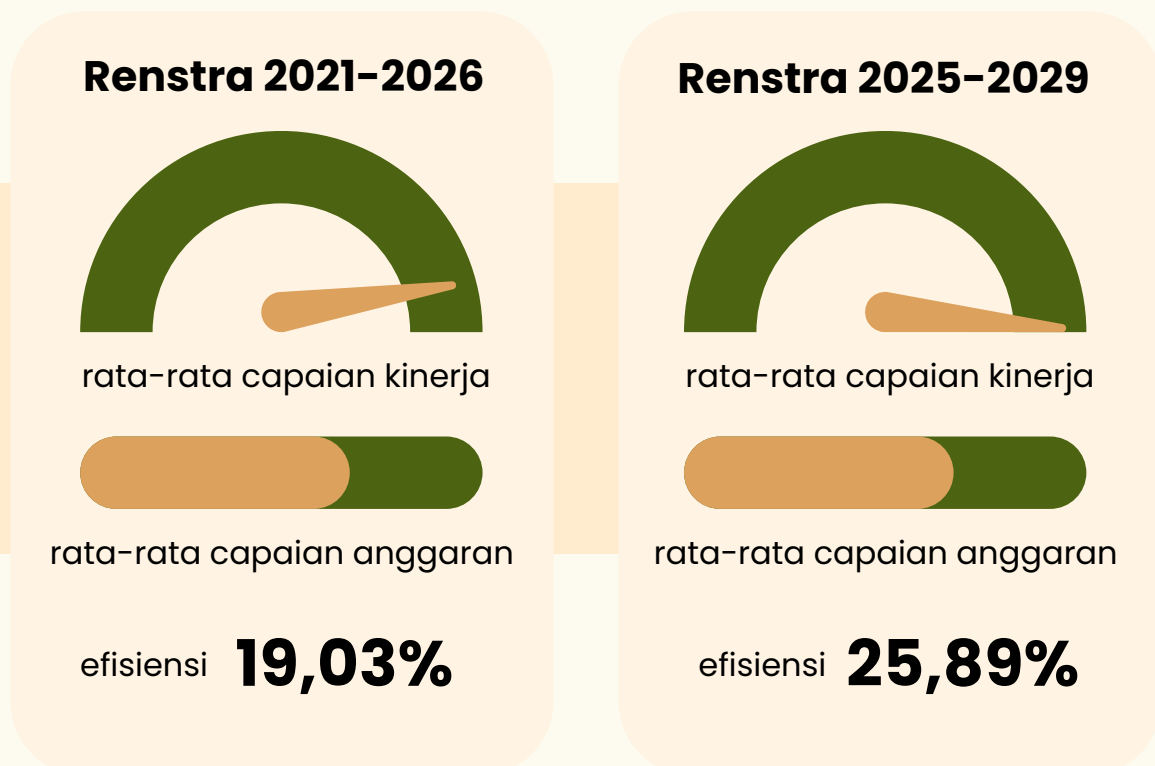
A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama Tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra). Berikut merupakan pencapaian kinerja Tahun 2025 :



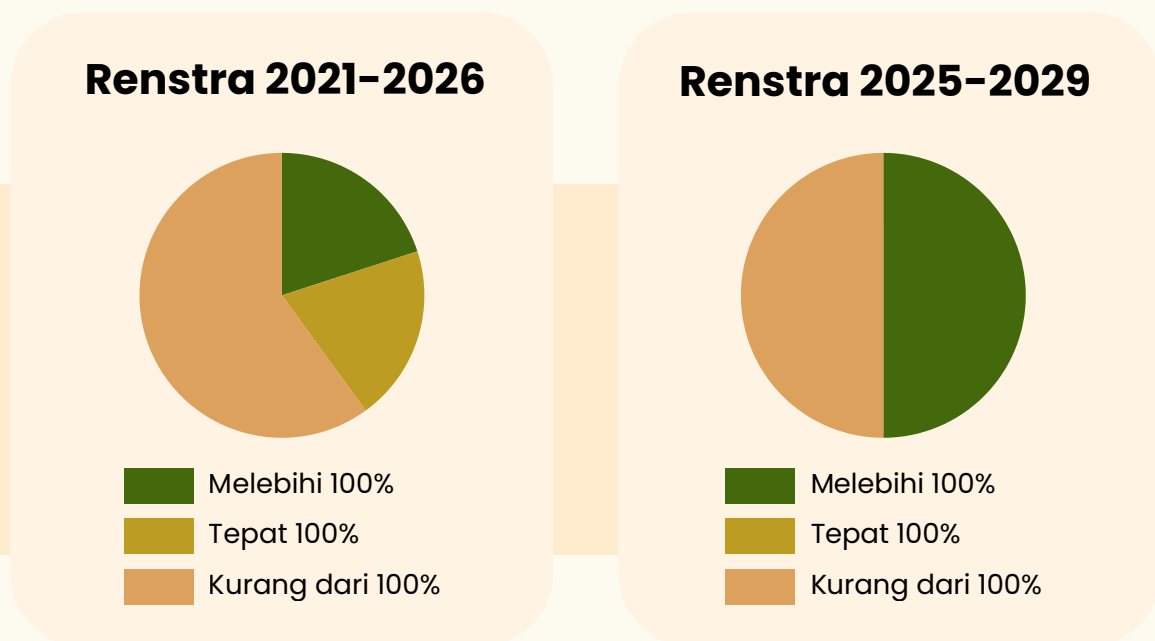
- Pada Renstra 2021-2026 hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 92,09% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 74,57% dengan kategori “SEDANG” dan efisiensi sebesar 19,03%.
- Pada Renstra 2025-2026 hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 102,76% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan rata-rata capaian anggaran sebesar 74,57% dengan kategori “SEDANG” dan efisiensi sebesar 25,89%.



Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 10 (sepuluh) Indikator pada Renstra 2021-2026 dan 10 (sepuluh) Indikator pada Renstra 2025-2029, dapat disimpulkan sebagai berikut:



- Pada Renstra 2021-2026, terdapat 2 Indikator dengan capaian melebihi 100%, 2 Indikator dengan capaian tepat 100% dan 6 indikator dengan capaian kurang dari 100%
- Pada Renstra 2025-2026 terdapat 5 Indikator dengan capaian melebihi 100% dan 5 indikator dengan capaian kurang dari 100%



Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 113.121.078.443 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.84.356.165.469,11 atau 74.57%.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



B. SARAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian <100%	Permasalahan Utama	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang	Analisis Program/ Kegiatan yang kurang efektif	Rencana Tindaklanjuti	TIMELINE 2026 (TRIWULAN)			
								I	II	III	IV
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan	99.90%	Terdapat perubahan formulasi perhitungan oleh KemenPANRB dan berubah nama menjadi Nilai Kapabilitas Kelembagaan (PERMENPAN RB No. 4 tahun 2026) sehingga menggunakan realisasi tahun sebelumnya.	- Evaluasi Penataan Struktur Organisasi; - Pembakuan SOP; - Keselaran strategis - terkait proses bisnis; - Tata kelola dan akuntabilitas terkait transparansi informasi publik; - Evaluasi dan Penerapan kebijakan manajemen risiko; - Transformasi digital.	Koordinasi kerja lintas sektoral dinilai belum sepenuhnya optimal.	- Pelaksanaan pemenuhan pernyataan dalam rangka penilaian kapabilitas kelembagaan - Reviu Proses bisnis	v	v		



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian <100%	Permasalahan Utama	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang	Analisis Program/ Kegiatan yang kurang efektif	Rencana Tindakanjnt	TIMELINE 2026 (TRIWULAN)			
								I	II	III	IV
2	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladmini strasi penyeleng garaan pelayanan publik	95.41%	Pemenuhan aspek input dalam penyelenggara an pelayanan publik masih belum optimal, terutama pada kesiapan sumber daya, standar pelayanan, kompetensi pelaksana, dan sarana pendukung pelayanan.	- Koordinasi dengan ombudsman pedoman penilaian maladministra si penyelenggar aan pelayanan publik - Sosialisasi persiapan penilaian maladministra si penyelenggar aan pelayanan publik - Pendampinga n pemenuhan data dukung	Sosialisasi persiapan penilaian maladministr asi penyelenggar aan pelayanan publik belum optimal	- Workshop penyusunan Sandart pelayanan - Reviu standar pelayanan - Penyusunan laporan SKM - verifikasi kondisi faktual di lapangan	v	v	v	



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian <100%	Permasalahan Utama	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang	Analisis Program/ Kegiatan yang kurang efektif	Rencana Tindaklanjuti	TIMELINE 2026 (TRIWULAN)			
								I	II	III	IV
3	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	98.05%	Implementasi dan evaluasi kebijakan belum berjalan optimal, terutama dalam pemantauan pelaksanaan, pengukuran hasil dan dampak, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.	- Penyusunan Kajian Kebijakan - Konsultasi/Partisipasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan - Penyusunan Kebijakan Berbasis Data dan Bukti - Evaluasi Kebijakan - Penguatan Kapasitas Analisis/Pengelola Kebijakan	Konsultasi publik yang bersifat formalitas karena Masyarakat hadir tetapi masukan tidak ditindaklanjuti	- Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan secara berkala - Memperkuat koordinasi dan tindak lanjut atas kendala implementasi - Melaksanakan evaluasi kebijakan secara berkala				v v v



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian <100%	Permasalahan Utama	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang	Analisis Program/ Kegiatan yang kurang efektif	Rencana Tindaklanjut	TIMELINE 2026 (TRIWULAN)			
								I	II	III	IV
5	Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	99.13%	Data realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) belum rilis sehingga menggunakan data tahun 2024	- Fasilitasi Pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) - Monitoring dan Evaluasi Akses Keuangan Masyarakat - Fasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan bagi UMKM dan Pelaku Usaha	- Koordinasi masih dominan berupa rapat dan pelaporan, sementara tindak lanjut program belum terpantau secara terukur - Fasilitasi belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan jumlah UMKM yang memperoleh akses pembiayaan	Mengarahkan edukasi kepada kelompok/wilayah dengan akses keuangan rendah dan melakukan evaluasi pasca kegiatan				v



Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



A decorative graphic consisting of several concentric, semi-circular arcs in a light gray color, positioned behind the main title bar.

LAMPIRAN

A. PERJANJIAN KINERJA APBD 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK



FANDI AKHMAD YANI

Rectangular Snip

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara dinamis serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	1	Predikat AKIP	83.5
		2	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik
		3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	sangat baik
2	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)	3,3
		2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 %
		3	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	98,7 %
		4	Nilai Peduli HAM	96
3	Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	1	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	4
		2	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	88.59 %
		3	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	92 %
No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan

1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 68,880,663,084.59	APBD
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 40,307,297,714.99	APBD
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2,649,193,530.60	APBD
Jumlah			Rp. 111,837,154,330.18	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAH YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK


ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN



B. PERJANJIAN KINERJA PAPBD 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP lebih besar sama dengan 80	40.46
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Nilai LPPD	3.3
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	1 Hasil Evaluasi Kelembagaan	96.8
4	Meningkatnya mutu pelayanan publik	1 Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	96
5	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	1 Indeks Kualitas Kebijakan	84.5
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	1 Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	88.23
7	Meningkatnya tata kelola pengadaan	1 Indeks tata kelola pengadaan	77
8	Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	1 Angka Inflasi	3.5
9	Terpenuhinya HAM masyarakat atas bantuan hukum	1 Nilai Peduli HAM	90.96
10	Meningkatnya kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten Gresik	1 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4.62

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Rp. 70,088,970,998.90	PAPBD
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 41,010,542,795.00	PAPBD
3	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 2,021,564,649.10	PAPBD
Jumlah			Rp. 113,121,078,443.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

